

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI
UMUM TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMSEL
(Studi kasus Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan)**

SKRIPSI



**NAMA : PUTRI KURNIASARI
NIM : 222014062**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

2019

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI
UMUM TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMSEL
(Studi kasus Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



NAMA : PUTRI KURNIASARI

NIM : 222014062

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

2019

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Putri kurniasari

Nim : 22.2014.062

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi yang telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan dari karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, Februari 2019



Putri Kurniasari

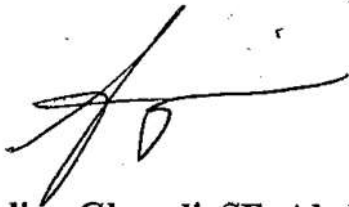
TANDA PENGESAHAN USULAN PENELITIAN

Judul : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja keuangan di 17 Kab/Kota Provinsi Sumsel
Nama : Putri Kurniasari
NIM : 22.2014.062
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal.....2018

Pembimbing I

Pembimbing II



Hj. Rosalina Ghazali, SE., Ak., M.Si
NIDN/NBM:0228115802/1021961



Nina Sabrina, SE., M.Si.
NIDN/NBM:0216056801/851119

**Mengetahui,
Dekan**

u.b. Ketua Program Studi Akuntansi



Betri, SE., Ak., M.Si.CA

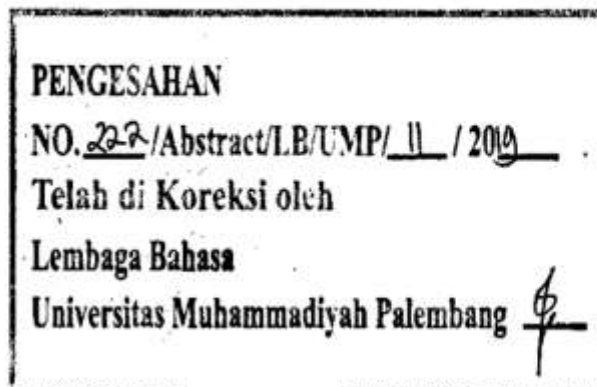
NIDN/NBM: 0216106902/944806

Abstrak

Putri Kurniasari / 222014062 / 2019 / The Influence of Regional Original Revenue and General Allocation Funds on regional financial performance in South Sumatra Province / Public Sector Accounting.

The financial performance of local governments was a reflection of the success of local governments in managing regional finance. This study aimed to determine the influence of local revenue (PAD) and general allocation funds (DAU) on the financial performance of the City / South Sumatra Province. This study was associative research. The variables used in this study were the regional original income and the general allocation of data used was secondary data with data collection techniques using documentation analysis. The analytical method and data analysis technique used in this study were qualitative and quantitative analysis methods and analytical techniques with the help of the Statistical Program Special Science (SPSS) Program. The results of this study indicated that local revenue gave significant positive influence on the financial performance of local governments. General allocation funds did not give significant influence on the level of financial performance of local governments.

Keywords: Regional original income, general allocation funds, financial performance



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- ❖ *“sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan” (QS. Alinsyiroh : 6)*
- ❖ *“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” (QS. Al Baqorah : 286)*
- ❖ *“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa-apa yang pada diri mereka” (QS. Ar Ra’d :11)*
- ❖ *“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya” (QS. An Nafm :39)*

Putri Kurniasari

Kupersembahkan Kepada :

- ❖ *Kedua orang tuaku tercinta
(Ayahku Muchtar dan Syamsiarti)*
- ❖ *Dosen pembimbing skripsiku tercinta*
- ❖ *Teman-teman seperjuangan*
- ❖ *Saudara-saudaraku tercinta
(Devi fitria, Nurul hidayah dan Azahira
Syalsabillah)*
- ❖ *Almamater kebanggaanKU*

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-nya penulis dapata menulis skripsi ini dengan judul Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, bahwa penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE). Baerdasarkan hasil observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap dana alokasi umum terhadap kinerja keuangan daerah. Berdasarkan permasalahan yang ada penulis merumuskan bagaimanakah pengaruh kualitas pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap dana alokasi umum terhadap kinerja keuangan daerah.

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab,yaitu bab pendahuluan, ban kajian kepustakaan, kerangka pemikiran dan hipotesis; bab metode peneltian; bab hasil penelitian dan pembahasan; serta bab simpulan dan saran. Pada penulisan skripsi ini, penulis sudah melakukan semaksimal mungkin mencurahkan kemampuan yang dimiliki, tetapi tapa adanya saran, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak, maka skripsi ini tidak mungkin dapat tersusun sebagaimana mestinya.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan terutama kepada kedua orang tua ku tercinta (Ayah Muchtar dan ibu Syamsiarti) yang senantiasa selalu memberikan do'a dan dukungan baik moril maupun materil yang memiliki makna yang besar

dalam proses ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada ibu Hj. Rosalina Ghozali, S.E.,Ak.,M.si selaku pembimbing 1 dan ibu Nina Sabrina, SE., M.si selaku pembimbing 2 yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan mulai dari penyusunan proposal penelitian sampai pada penyelesaian skripsi ini. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada.

1. Bapak Dr. Abib Djazuli,S.E.,M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan/karyawati.
2. Bapak Drs.H.Fauzi Ridwan, M.M. selaku Dekan fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan/karyawati.
3. Bapak Betri Sirajuddin, S.E.,Ak.,M.Si.,CA selaku ketua Program Akuntansi Fakultas ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Darma Yanti, S.E.,Ak.,M.M selaku Pembimbing Akademik paket 12 akuntansi.
5. Pimpinan beserta staf dan karyawan/karyawati Badan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kebaikan, amal dan ibadah yang dilakukan mendapatkan balasan dari-Nya. Amin

Wasaalamualaikum Wr.Wb

Palembang, 2019
Penulis,

Putri kurniasari

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN BEBAS PLAGIA	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRAKATA	v
HALAMAN DAFTAR ISI.....	vii
HALAMAN DAFTAR TABEL	x
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
 BAB II. KAJIAN KEPUSTAKAAN, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS	

A. Landasan Teori	
1. Pendapatan Asli Daerah	
a. Pengertian PAD.....	10
b. Komponen PAD.....	11
2. Dana Alokasi Umum	
a. Pengertian DAU	15
b. Komponen DAU.....	16
3. Kinerja Keuangan	
a. Pengertian Kinerja Keuangan	17
b. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	18
c. Pengukuran Kinerja Keuangan	18
d. Tujuan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	19
e. Indikator Kinerja Keuangan.....	19
B. Penelitian Sebelumnya	21
C. Kerangka Pemikiran.....	25
D. Hipotesis.....	26

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	27
B. Lokasi Penelitian	28
C. Operasionalisasi Variabel.....	28
D. Populasi dan Sampel	29
E. Data yang Diperlukan.....	29
F. Metode Pengumpulan Data	30

G. Analisis Data dan Dana Teknik Analisis.....	32
--	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Provinsi Sumatera Selatan.....	39
2. Sejarah Badan Pendapatan Asli Daerah (BAPENDA) Provinsi Sumatera Selatan	42
3. Visi DAN Misi	42
4. Tujuan Organisasi	43

B. Pembahasan

1. Hasil Pengujian Hipotesis Secara Simultan	55
2. Hasil Pengujian Secara Parsial.....	58

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	61
-------------------	----

B. Saran	61
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA	63
-----------------------------	-----------

IAMPIRAN	64
-----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Data realisasi APBD	6
Tabel II.1	Penelitian Sebelumnya	23
Tabel III.1	Operasional variabel.....	27
Tabel III.2	Populasi Penelitian	28
Tabel IV.1	Data Realisasi APBD	44
Tabel IV.2	Hasil Pengujian Analisis Statistik Deskriptif	46
Tabel IV.3	Hasil Uji Normalitas	48
Tabel IV.4	Hasil Uji Multikolinieritas	40
Tabel IV.6	Hasil Uji Autokorelasi	51
Tabel IV.7	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	52
Tabel IV.8	Hasil Analisis Koefisien Determinasi	54
Tabel IV.9	Hasil Uji Anova (F)	55
Tabel IV.10	Hasil Uji t	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran	25
Gambar IV.1 Peta Sumatera Selatan	41
Gambar Uji Heteroskedaitas	50

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 2 Sertifikat AIK
- Lampiran 3 Sertifikat TOEFL
- Lampiran 4 Surat Keterangan Selesai Riset
- Lampiran 5 Hasil Uji SPSS
- Lampiran 6 Hasil Uji Hipotesis (Uji t)
- Lampiran 7 Hasil Uji Hipotesis (Uji F)
- Lampiran 8 Biodata Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Daerah yang berada di wilayah Republik Indonesia tidak dapat terlepas dari adanya peran dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal menjalankan fungsi pemerintahan yang ada pada di setiap daerah. Namun, dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang berlaku pada setiap daerah di wilayah Republik Indonesia menjadikan pemerintah daerah memiliki pelimpahan kewenangan dengan cakupan luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri serta meminimalisir campur tangan pemerintah pusat. Dengan cakupan tersebut, pemerintah daerah dapat mempermudah aspirasi masyarakat sehingga diperoleh gambaran yang cukup tentang kebijakan jangka pendek, jangka menengah, dan kebijakan jangka panjang yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang mendukung kemampuan keuangan daerah. Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang no.28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di Pasal 285 ada disebutkan tiga jenis sumber pendapatan daerah: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

Menurut Mardiasmo (2011:12) kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari sebagai berikut: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pemerintah dituntut untuk lebih mandiri dalam pengelolaan sumber-sumber ekonominya yang nantinya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun pemerintah pusat juga terus mendukung pemerintah daerah melalui dana transfer ke pemerintah daerah yakni Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Menurut Sembiring (2010 : 196) Dana Alokasi Umum (DAU) adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang di alokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Sembiring (2010 : 331) Dana Alokasi Umum (DAU) suatu daerah yang ditentukan oleh besar kecilnya celah fiskal (fiscal gap) suatu daerah, yang merupakan selisih antar kebutuhan daerah (fiscal need) dan potensi daerah (fiscalcapacity).

Alokasi Dana Alokasi Umum bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum yang relatif kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum relatif besar. Dengan demikian pengelolaan keuangan suatu pemerintah daerah dapat dilihat dari kinerja keuangannya.

Menurut Fahmi (2012 : 239) Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan

dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja keuangan pemerintah daerah pada penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio pertumbuhan pendapatan daerah. Menurut Halim (2008:241) rasio pertumbuhan pendapatan daerah dapat menunjukkan seberapa besar kemampuan yang dimiliki pemerintah daerah untuk mempertahankan atau meningkatkan pertumbuhannya dari satu periode ke periode berikutnya.

Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di bidang Keuangan Sub Pendapatan Daerah. Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Ebit, dkk (2012) yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli daerah (PAD) dan Dana Perimbangan secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

Penelitian yang dilakukan oleh Gina, dkk (2018) yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Joice, dkk (2018) yang berjudul Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial variabel PAD (x1) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Kabupaten Gorontalo. Dan variabel DAU (x2) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Kabupaten Gorontalo. Variabel DAK (x3) memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Kabupaten Gorontalo.

Provinsi Sumatera Selatan secara administratif terdiri dari 13 (tigabelas) Pemerintah Kabupaten dan 4 (empat) Pemerintah Kota, dengan Palembang sebagai ibukota provinsi. Pemerintah Kabupaten dan Kota membawahi Pemerintah Kecamatan dan Desa / Kelurahan, Provinsi Sumatera Selatan memiliki 13 Kabupaten, 4 Kotamadya, 212 Kecamatan, 354 Kelurahan, 2.589 Desa. Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi Kabupaten dengan luas wilayah terbesar dengan luas 16.905,32 Ha, di ikuti oleh Kabupaten Musi Banyuasin dengan luas wilayah sebesar 14.477 Ha.

Berdasarkan fenomena yang terkait dengan kinerja keuangan berdasarkan Tribun Sumsel.com (2016), Rapat koordinasi Pendapatan Asli Daerah (RAKOR PAD) Provinsi Sumatera Selatan yang digelar di kantor Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA). Karena bertahun-tahun PAD dan retribusi ini tak pernah sesuai target. Padahal retribusi ini merupakan kewajiban masyarakat yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Untuk tahun ini, realisasi penerimaan target dari

Rp.106,58 miliar baru tercapai sebesar Rp. 60 miliar atau jika di persentasekan, pencapaiannya hanya 56,44 persen. Dengan tidak tercapainya target ini mempengaruhi struktur APBD. Artinya kinerja keuangan daerahnya harus diperbaiki.

Peneliti mencoba meneliti mengenai jumlah pendapatan asli daerah yang di dapat dari Badan Pendapatan Daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Berikut ini adalah data mengenai pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan kinerja keuangan Pemerintah Kota/Kabupaten Sumatera Selatan, selama tiga tahun terakhir, dari tahun 2015-2017 yang dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel I.1
Data Realisasi APBD Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2015-2016

Kab/Kota	Tahun	PAD (Jutaan Rupiah)	DAU (Jutaan Rupiah)	Kinerja Keuangan
Kab Lahat	2015	189.585	622.782	30,44
	2016	184.973	703.887	26,28
	2017	134.434	703.887	17,26
Kab Musi Banyuasin	2015	181.795	131.033	138,72
	2016	169.012	324.837	52,02
	2017	203.694	347.346	52,11
Kab Musi Rawas	2015	97.998	578.786	15,44
	2016	96.744	641.789	15,07
	2017	115.000	643.608	0,01
Kab Muara Enim	2015	178.245	610.384	29,02
	2016	150.913	673.162	22,42
	2017	161.959	673.162	22,91
Kab Ogan Komering Ilir	2015	110.225	958.999	11,03
	2016	108.992	1.049.995	10,38
	2017	309.042	1.052.112	26,74
Kab Ogan Komering Ulu	2015	98.756	568.563	17,36
	2016	87.579	635.552	13,77
	2017	81.066	636.452	07,70

Kab/Kota	Tahun	PAD (Jutaan Rupiah)	DAU (Jutaan Rupiah)	Kinerja Keuangan
Kota Palembang	2015	736.927	1.210.605	60,87
	2016	781.414	1.292.125	60,47
	2017	894.010	1.292.125	69,18
Kota Prabumulih	2015	72.236	406.701	17,76
	2016	86.253	414.174	20,82
	2017	104.330	415.882	25,08
Kota Pagar Alam	2015	53.419	351.582	15,19
	2016	51.113	390.188	13,09
	2017	52.126	390.845	11,65
Kota Lubuk Linggau	2015	66.725	415.549	16,06
	2016	75.797	446.789	16,96
	2017	82.748	448.144	18,46
Kab Banyuasin	2015	96.219	829.437	11,60
	2016	104.218	930.552	11,19
	2017	107.759	931.958	24,04
Kab Ogan Ilir	2015	42.843	557.403	7,68
	2016	109.763	623.839	11,11
	2017	283.502	625.366	45,33
Kab Oku Timur	2015	64.281	693.715	9,27
	2016	69.357	760.212	9,12
	2017	64.786	762.354	8,49
Kab Oku Selatan	2015	34.197	523.634	6,53
	2016	35.697	588.216	6,06
	2017	42.495	590.456	0,70
Kab Empat Lawang	2015	27.118	366.775	7,39
	2016	22.348	416.952	5,35
	2017	35.333	419.599	8,11
Kab Penukal Abab Lematang Ilir	2015	4.237	186.115	2,27
	2016	26.351	319.054	8,26
	2017	56.924	331.768	17,16
Kab Musi Rawas Utara	2015	29.172	324.442	8,99
	2016	32.175	378.121	8,51
	2017	34.12	395.256	8,63

Sumber :BAPENDA Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan data pada tabel I.1, dari tahun 2015-2017 dengan perhitungan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan

Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pedapatan yang diperlukan daerah.

Kemandirian keuangan daerah ditujukan dari besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain seperti bantuan pemerintah pusat atau pun dari pinjaman. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Dari tahun 2015-2017 Kab Musi Rawas, Kota Pagar Alam, dan Kab Oku Selatan memiliki kontribusi pendapatan asli daerah yang meningkat, namun tingkat kinerja keuangan menurun.

Kemudian Kab Musi Banyuasin, Kab Muara Enim, Kab Ogan Komering Ilir, Kota Palembang, kota Lubuk Linggau, Kab Banyuasin, Kab Ogan Ilir, Kab Empat Lawang, Kab PenukalAbabLematangIlir, dan Kab. Musi Rawas Utara memiliki kontribusi dana alokasi umum yang meningkat, namun tingkat kinerja keuangan daerahnya juga meningkat.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas dan beberapa penelitian sebelumnya yang terdapat perbedaan hasil penelitian, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Kota/Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat ditemukan permasalahan yang ada yaitu : Bagaimanakah pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota /Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota/Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil yang nanti akan dicapai pada penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

Pembelajaran awal dalam melakukan suatu penelitian juga menambah pengetahuan dan pemahaman tentang adanya pengaruh efektivitas pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus dan belanja modal pemerintah daerah.

b. Bagi Pemerintah BAPENDA

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah BAPENDA sebagai acuan dalam mengambil kebijakan sekaligus sebagai evaluasi terhadap belanja modal.

c. Bagi Almamater

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah referensi bagi mahasiswa dalam mengembangkan dan melakukan penelitian pula dibidang yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Muhammad Syam Khusufi. (2014). *Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Keuangan Daerah*. (edisi 4) Jakarta : Salemba Empat.
- Albert, Kurniawan. (2014). *Metode Bisnis Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- Budianto dan Stanly W Alexander. (2016). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Perimbangan Alokasi Terhadap Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal EMBA ISSN 2303-1174: 2016. Banten.
- Ebit Julitawati, Darwanis dan Jalaludin. (2012). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh* . Jurnal Akuntansi ISSN 2302-0164: Volume 1, No. 1, Agustus 2012. Aceh.
- Fahmi, Ilham. (2012). *Analisis Laporan Keuangan*. Cetakan pertama. Bandung: Alfabeta.
- Harnojoyo. 2016. *Harnojoyo Tidak Puas Pendapatan Asli Daerah Sumsel Minim*. www.tribun.com. Diakses pada 28 November 2018.
- I Dewa Gde Bisma dan Hery Susanto. (2010). *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007*. Jurnal Ganec Swara. Edisi Khusus. 4 (3): 75-86. Nusa Tenggara Barat
- Imam, Ghozali. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. (edisi 8) Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Joice Machumud dan dan Lukfiah Irwan Radjak. (2018). *Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal of Accounting Science EISSN 2548-3501: Januari 2018. Gorontalo.
- Jumingan. (2011). *Analisis Laporan keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Penerbit UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Ni Putu Gina Sukma Antari dan Ida Bagus Panji Sedana. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja keuangan Pemerintah Daerah*. E-Jurnal Manajemen Unud ISSN 2302-8912: Volume 7, No. 2, 2018. Bali.

- Rakhmini juwita. (2016). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten*. Jurnal Semnas Fekom: Volume 4, No. 4, Desember 2016. Sulawesi Utara
- Rudianto. (2013). *Akuntansi Manajemen Informasi Untuk Pengambilan Keputusan Strategis*. Jakarta: Erlangga.
- Sembiring, Sentosa. (2009). *Pemerintah Daerah (PEMDA*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Siregar, Baldric. (2015). *Akuntansi Sektor Publi*. Cetakan Pertama. Edisi Pertama. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Baru Press.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daaerah dan Perubahannya.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pengertian Pendapatan Asli Daerah.
- V. Wiratna Sujarweni. (2015). *Metode Penelitian Bisnis dan ekonomi*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Wempy Banga. (2017). *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Wempy Banga. (2017). *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.